

Perubahan Sosial Politik Di Arab Saudi 1932-1975

Riyan Hidayat, Yon Machmudi

Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Strategik dan Global Islam, Universitas Indonesia

E-mail: riyan.hidayat51@ui.ac.id, machmudi@ui.ac.id

Abstract

This thesis aims to examine the phenomenon of social change that have occurred in Saudi Arabia from 1932 to 1975. This study becomes interesting because Saudi Arabia as a country that has a homogeneous society experienced a drastic change from a non nation-state became a nation-state. The country later amended socially in terms of social stratification, changes in socio-political and socio-cultural drastically during the period between 1932 and 1975. In addition, there is no studies yet that specifically examines about social changes in specific aspects such as sociological changes in Saudi Arabia. The analysis of this thesis uses qualitative methods to explain the observed phenomena qualitatively. The data analysis method is inductive-descriptive. Inductive analysis is used to see the data quality in the form of empirical values and aims to consider the contained values explicitly from the analysis structure. Descriptive analysis is used to interpret the empirical data into words and pictures as an overview of the research report. To get the data that will be analyzed, the author use the method of data collection in the form of literature reviews. Result of this research is shows that changes in the social structure into the royal family, the rich and the new middle class, a change in the sociopolitical aspects of the legitimacy of the Al Saud clan area, as well as socio-cultural aspects of change in industrialization, social mobilization and gender.

Keywords: Sociopolitical Change, Saudi Arabia, Social Structure, Sociopolitical, Sociocultural

PENDAHULUAN

Periode 1930an hingga periode 1970an bagi negara Arab Saudi adalah periode transformasi. Pada masa 1932 – 1975–pada masa Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, Saud bin Abdul Aziz Al Saud dan Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, para peneliti dan penulis sejarah menuliskan informasi adanya usaha-usaha serta perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek dengan berbagai variabel pendukung. Variabel tersebut antara lain adalah kecakapan pemimpin, kualitas kebijakan,

serta ekonomi yang lebih baik. Sebagai contoh, misalnya Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, sebagai salah satu raja Arab Saudi yang memerintah pada 1964 – 1975 melakukan reformasi di berbagai bidang sehingga menjadikan Arab Saudi menjadi negara yang lebih modern. Secara tokoh, Faisal pernah dinobatkan menjadi orang paling berpengaruh, bahkan di dunia. Majalah *Time* menobatkan Faisal bin Abdul Aziz Al Saud sebagai *Man of The Year* pada 1974 atas kiprahnya dan pengaruhnya di dunia (The Tuscaloca News,1974:15).

Majalah *Time* pada sampulnya menyatakan "*Both in his own right and as a symbol of the other newly powerful potentes of oil, Saudi Arabia's King Faisal is the Man of the Year*" (The Tuscaloca News,1974:15). Richard Freeman mengatakan dengan kalimat yang tendensius mengatakan bahwa Faisal bin Abdul Aziz Al Saud dengan sebutan *one of the most evil men of the 20th century* karena merugikan negara lain dengan kebijakan embargo dan penyebaran paham wahabi yang dianggap oleh Freeman sebagai akar dari radikalisme agama (Freeman,2014:30-33).

Sebelum menjadi pengeksport minyak, Arab Saudi dipandang sebagai negara biasa atau oleh Niblock disebutkan sebagai *minimal state model*. Realitasnya menunjukkan bahwa tidak banyak uang yang beredar di Arab Saudi yang dapat dipergunakan untuk menaikkan tingkat perekonomian negara. Struktur pemerintahan hanya memenuhi unsur dasar dan terlihat kontras dengan sebuah negara yang sudah mapan (Niblock dan Monica,2007:32). Penunjukkan langsung dalam menduduki sebuah jabatan menjadi ciri utama sistem monarkial ketika Arab Saudi belum menjadi sebuah negara sendiri. Ketika rezim Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud di Hijaz, dia menunjuk langsung pejabat setingkat menteri. Misalnya, Abdullah al-Damluji yang asalnya dari Mosul, Irak dipercaya Abdul Aziz bin

Abdurrahman Al Saud sebagai penasihat kesehatan pada 1915. Namun, karena kecakapannya dalam berbahasa Perancis, Abdullah al-Damluji dipercaya sebagai perwakilan atau representasi raja yang kemudian menjadi deputi menteri luar negeri ketika Faisal bin Abdul Aziz Al Saud menjadi menteri menteri luar negeri (Philby,1955:294-295).

Ibnu Khaldun (2011:146-147) mengatakan bahwa masyarakat badui memiliki sikap pemberani berdasarkan sifat dasar mereka yang hidup menyendiri di padang pasir yang keras, sehingga memiliki ketergantungan utama pada diri sendiri. Ibnu Khaldun menambahkan bahwa masyarakat badui mempunyai semangat solidaritas sosial (*ashabiyah*) yang tinggi sehingga tidak akan tinggal diam apabila kaumnya merasakan sesuatu yang negatif (Khaldun,2011:151-152). Dalam prinsip *ashabiyah*, apabila ada salah satu saudara dalam satu pertalian hubungan darah disakiti, maka sama saja dengan menghina sekumpulan pertalian darah dari masyarakat badui tersebut. Mereka hidup tidak menetap di suatu daerah atau wilayah.

Karakter masyarakat Arab Saudi sebelum menjadi pengeksport minyak mencerminkan keadaan tradisional yang menitikberatkan pada pola patriarki dan memiliki relasi yang kuat akan hal tersebut. Halim Barakat mengungkapkan bahwa keluarga masyarakat Arab merupakan unit

sosial ekonomi dalam tiga pola yang terdiri dari masyarakat Arab-Badui, desa dan kota (Barakat,2012:30). Ciri khas yang menaungi ketiganya adalah seorang Arab ingin dikenal sebagai seseorang yang diafiliasikan atas suatu kelompok dan mengabaikan konteks privasi. Mereka menjunjung loyalitas terhadap klan, keluarga dan komunitas (Barakat,2012:31-32). Ada kecenderungan dalam mengurus suatu hal akan menjadi tanggung jawab bersama seperti dalam hal bisnis dan usaha.

Menurut masyarakat badui Arab, terutama dalam lingkup politik, kepemimpinan dibentuk juga atas dasar sistem hubungan darah. Setiap bani (suku) akan dipilih berdasarkan hubungan darah dan beberapa kriteria yang telah disepakati. Kriteria tersebut antara lain berani, dermawan, lincah dan memiliki pengaruh yang besar atas sukunya sendiri. Kepemimpinan bersifat monopolis dan otoriter, yaitu tidak adanya ruang aspirasi bagi entitas yang dipimpin dan besarnya kekuasaan pemimpin atas entitas tersebut. Besarnya kekuasaan tersebut, memungkinkan pemimpin kabilah untuk menguasai aset-aset yang ada pada masyarakatnya (Nata,2011:53). Untuk konteks Arab Saudi, hubungan erat antara para pemimpin suku nomaden dan semi-nomaden yang utama dengan klan Al-Saud adalah terbentuk dari proses ekspansi dan penaklukan sebelum negara modern

dibentuk. Para pemimpin suku hadir untuk memainkan peran penting sebagai penjamin ketenangan dan situasi kondusif masyarakat kesukuan dan Raja (Niblock,2006:12).

Peneliti menyetujui sebagaimana pendapat Hazem Zeki Nuseibeh yang telah menyatakan sebuah prediksi bahwa basis perubahan sosial ekonomi Arab Saudi atau negara Arab secara umum adalah sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut digunakan untuk kegiatan industrialisasi seperti minyak dan mineral lain (Nuseibeh,1956:194-195). Hal tersebut memicu perkembangan ekonomi dan memaksa pemenuhan sumber daya sebagai kebutuhan lain dari pengembangan ekonomi (Nuseibeh,1956:199-200). Nuseibeh menambahkan hal itu akan berjalan baik apabila semua komponen terintergasi dengan baik (Nuseibeh,1956:206).

Minyak bumi sebagai satu hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan raja-raja Arab Saudi selama memimpin yang didasarkan atas menguatnya ekonomi yang diakibatkan oleh melimpahnya hasil minyak bumi sebagai komoditas yang berharga di dunia. Selain minyak, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan sosial dan ekonomi yang dikeluarkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, Saud bin Abdul Aziz Al Saud dan Faisal bin Abdul Aziz Al

Saudi juga menarik untuk ditinjau sebagai sebuah variabel yang perlu diteliti dalam melihat perubahan-perubahan di Arab Saudi. Transformasi masyarakat Arab Saudi dalam aspek sosial dan ekonomi merupakan implikasi yang dihasilkan oleh adanya kedua hal tersebut –minyak dan kebijakan pemimpin (Wynbrandt,2004:191-192).

TINJAUAN TEORITIS

Landasan teori adalah aktivitas pengaitan pembahasan dengan teori yang ada dalam dunia penelitian ilmiah (Suparno,2008:37). Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori, yaitu teori perubahan sosial dari Piotr Stompzka dan teori modernisasi yang dijelaskan oleh M. Francis Abraham. Teori perubahan sosial ditulis Stompzka dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Perubahan Sosial* dan Teori Modernisasi ditulis oleh Abraham dalam buku *Moderniasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*. Teori perubahan sosial digunakan oleh peneliti untuk melihat perubahan-perubahan realitas sosial politik yang terjadi pada era 1932-1975. Sementara itu, teori modernisasi digunakan oleh peneliti untuk melihat leih lanjut perubahan yang lebih modern dan terjadi perubahan sosial politik yang signifikan dalam era periode tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian yang terkait dengan dinamika sosial-politik Arab

Saudi dan perubahannya selama era 1932-1975. Oleh karena itu, peneliti memasukkan identifikasi dasar masyarakat Arab untuk melihat pola perubahan sosial-politik serta memasukkan informasi-informasi yang berkaitan dengan politik ekonomi. Realitas sosial yang dibangun pada era tersebut dapat dilihat dari sistem dasar dan budaya yang tertanam yang memberikan identifikasi sosial secara utuh mengenai masyarakat Arab, khususnya Arab Saudi dan perkembangannya.

Perubahan sosial menurut Piötr Sztompka dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Sztompka menambahkan bahwa konsep perubahan sosial mencakup tiga gagasan pokok; (1) pebedaan; (2) waktu yang berbeda; dan (3) di antara keadaan sistem sosial yang sama (Sztompka,2011:3). Ahli lain menjelaskan dalam definisi yang lebih sederhana antara lain adalah Charles L. Harper yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah pergantian yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu (Martono,2012:3). Perubahan sosial yang telah didefinisikan oleh Sztompka dan Harper sangat berkaitan dengan ruang dan waktu yang mengambil variabel struktur atau sistem sosial dan waktu yang berbeda.

Sementara itu, M. Francis Abraham dalam menyatakan modernisasi, menyebutkan bahwa modernisasi memiliki tiga sisi yang saling berkaitan, yaitu *structural*, *attitudinal*, dan *Processual*. *Structural* yang diartikan sebagai diferensiasi struktural kelembagaan yang kemudian dijelaskan oleh Abraham dengan penjelasan pengembangan institusi secara inovatif. Hal itu dicirikan dengan adanya pemisahan-pemisahan hubungan ekonomi dari tipe hubungan sosial lainnya yang mencakup pada mata rantai hubungan produksi, kebangkitan lembaga politik kenegaraan baru, perluasan sistem pendidikan formal, serta pengelompokan pekerjaan formal serta pengelompokan berdasarkan profesi, diferensiasi kegiatan keluarga dalam keluarga inti serta semakin mudarnya stratifikasi sosial. Abraham mengatakan hal itu tetap harus didukung dengan integrasi yang baik (Abraham,1991:9). Sisi *structural* memiliki keterkaitan yang erat dengan adanya perubahan secara sistematis dan berimplikasi sistemik. Abraham mengutip Eisenstadt yang mengatakan bahwa,

“.. ciri utama modernisasi struktural telah didefinisikan sebagai perkembangan perluasan diferensiasi besar-besaran; perkembangan sumber daya secara bebas yang tidak terkait dengan kelompok-kelompok yang tetap,

yang dibawa sejak lahir; perkembangan tipe-tipe organisasi sosial yang terspesialisasi dan terdiversifikasi; perkembangan identifikasi kelompok secara luas yang tidak berdasarkan tradisi, “kebangsaan”, bahkan supernasional; dan perkembangan yang sama di dalam semua bidang kelembagaan utama, yakni peranan yang terspesialisasi dan mekanisme pengaturan spesialisasi yang luas serta mekanisme alokasi dan organisasi, seperti mekanisme pasar dalam kehidupan ekonomi, pemberian suara dan kegiatan partai politik, organisasi dan mekanisme birokrasi yang bermacam-macam di dalam kebanyakan bidang kelembagaan (Abraham,1991:18).”

Terminologi *Attitudinal* meliputi transformasi sikap tradisional seperti pada adat dan kepercayaan menjadi berbagai bentuk rasionalitas sekuler yang didasarkan pada ilmu dan skeptisisme yang terorganisasi. Abraham mengatakan variabel *attitudinal* mencakup motivasi yang semakin tinggi untuk berprestasi, aspirasi pendidikan tinggi, revolusi harapan yang meningkat, bangkitnya egalitarianisme dan pemberontakan terhadap otoritarianisme dan paternalisme (Abraham,1991:9-10). Sisi *processual* merupakan variasi yang luas yang

mencakup pada spesialisasi fungsional, peranan status baru, revolusi dalam komunikasi massa, pelepasan secara sukarela sebuah tradisi, perencanaan pembangunan dan dinamika sosial yang dibuat oleh agen perubahan, reaksi terhadap dinamika sosial tersebut yang akan merefleksikan ketidakseimbangan gerakan diferensiasi dan integrasi. Perubahan tersebut, menurut Abraham terjadi di negara yang sedang berkembang karena adanya kebangkitan nasionalisme, adanya birokrasi baru, fungsi manajerial yang baru, dan kegiatan ekonomi komersial (Abraham,1991:10).

METODE PENELITIAN

Metodologi sangat diperlukan dalam proses penelitian agar tercapai segala tujuan dalam proses penelitian tersebut yaitu karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam menjalankan prosedur penelitian ini yang merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Denzin dan Lincoln yaitu,

“Qualitative research is multimethod in focus, involving in interpretive, naturalistic approach it’s subject matter. This means that qualitative researchers study in their natural setting, attempting to make sense of interpret phenomena in terms of the meanings people

bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection of variety of empirical materials-case study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, and visual texts-that describe routine and problematic moment and meaning in individual’s lives (Denzin dan Lincoln,1994:42).”

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mengacu pada jenis penelitian studi kasus yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi (Emzir,2012:20). Creswell (2013:20) menambahkan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti mencermati suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Struktur Sosial

Masyarakat Arab secara umum memiliki model kehidupan yang seragam yang terdiri dari tiga macam; Kaum Badui,

Petani dan Kaum Urban. Ketiga model ini memiliki kontribusi besar dalam pembentukan struktur sosial bagi masyarakat Arab (Barakat,2012:13). Saad E. Ibrahim (1982:236-237) mengungkapkan bahwa masyarakat Arab pada abad ke 7 hingga 19 secara umum telah berlaku stratifikasi sosial. Saad menjelaskan yang pertama adalah *upper class* yang berjumlah sedikit dan terdiri dari para elit pemerintah seperti khalifah, sultan atau amir serta termasuk para pemimpin representasi di daerah, pemuka agama, hakim, pedagang besar dan pejabat pemerintah di bawah pemimpin tertinggi. Kedua, *lower class* yang secara kuantitas lebih tinggi dari *upper class* yang terdiri dari kaum urban profesional dan petani. Di sisi lain, terdapat kaum badui yang tidak terkoneksi langsung dengan pemerintah. Islam dan keterkaitan antara kekuasaan dan sosial dalam tataran masyarakat Arab dapat juga mempengaruhi konsep kelas sosial di masyarakat. Apabila hanya menggunakan dimensi ekonomi, James A. Bill (1972:420-427) mengatakan bahwa hal tersebut tidak memadai untuk dapat mempengaruhi dan membuat dinamika struktur dan kelas sosial. Bill (1972:420-427) menyebutkan bahwa menekankan ekonomi dalam menentukan sebuah kelas atau struktur sosial justru akan menyempitkan konsep struktur sosial itu sendiri dan tidak berlaku di masyarakat yang memiliki basis-basis

kekuasaan atau hubungan antar masyarakat yang lebih diutamakan. Di dunia Timur Tengah, pengaruh politik, keturunan dan pendidikan tradisional memang digantikan oleh peningkatan ekonomi dan berdampak pada struktur sosial. Namun, nilai-nilai seperti politik dan keturunan menjadi hal-hal yang diperhitungkan dalam sebuah kompetisi atau penandaan stratifikasi. Bill (1972:420-427) menguraikan bahwa di Timur Tengah, kelas sosial secara tradisional antara lain adalah; kelas pejabat (*ruling class*), kelas menengah yang terkait dengan birokrasi (*bureaucratic middle class*), kelas pekerja tradisional (*traditional work class*), petani, dan kaum badui.

Kelas-kelas dalam struktur sosial di Arab Saudi tetap berkembang dikarenakan kecenderungan negara-negara Arab berada pada proses transisi pada abad ke-20. Proses pembangunan yang berjalan, baik secara fisik maupun non fisik yang dilakukan pemerintah memicu distribusi kekayaan kepada individu yang berada di kelas lainnya, di luar kelas yang mengembangkan kekayaan tersebut. Seseorang dapat memiliki dua kelas yang berbeda dimensi, yaitu di satu sisi terdapat dalam kelas yang setara dengan *upper class*, tetapi di sisi yang lain, seseorang itu bisa saja menjadi *lower class* dalam dimensi pekerjaan.

1. Kerajaan dan Keluarga Kerajaan

Pada pernyataan Ibrahim (1982:52) bahwa *upper class* adalah kaum elit yang

berasal dari keluarga kerajaan dan institusi kerajaan itu sendiri. Kerajaan dan keluarga kerajaan mendapat posisi utama dalam pengelolaan dan stratifikasi tertinggi dalam tatanan kenegaraan. Keluarga kerajaan menjadi “bangsawan” yang dipisahkan dari ciri mayoritas yang ada. Mereka dianggap memiliki berbagai keistimewaan baik secara kehormatan maupun dalam hal material yang dianggap dapat mengatur sumber negara sebagai sumber miliknya. Dalam lingkungan kerajaan, posisi raja sebagai bagian dari keluarga kerajaan tentu memiliki sikap yang berbeda daripada bersikap kepada masyarakat yang dianggap merupakan entitas yang lain dari koloni keluarga kerajaan. Sementara itu institusi kerajaan dianggap berdekatan meskipun tidak memiliki keterkaitan langsung secara emosional dan kekeluargaan. Pada kasus kerajaan Arab Saudi, posisi keluarga kerajaan berada pada klan Al Saud.

Persoalan mengapa klan Al Saud menjadi dominan dan menempati tempat tertinggi dalam stratifikasi masyarakat Arab Saudi adalah terletak pada faktor sejarah yang mengesankan klan Al Saud sebagai pembentuk negara Arab Saudi. Pada konteks tersebut, dinasti Saud telah menjalankan aktivitas sejarah sebelum hal tersebut terbentuk. Di sisi lain, karakteristik kesukuan dan legitimasi yang sebelumnya dibalut dengan sistem dinasti kerajaan biasa telah diubah dalam bentuk kompleks

yang lebih modern dengan menempatkan kaidah *nation state* dalam pembentukan organisasi bangsa yang kemudian disebut sebagai negara Kerajaan Arab Saudi yang dibentuk pada 1932. Peralihan dan perubahan merupakan konsekuensi atas perubahan tersebut yang menghilangkan identitas kesukuan klan-klan di Arab Saudi di permukaan menjadi identitas kepala negara-kerajaan dengan masyarakat umum Arab Saudi yang sebelumnya merupakan masyarakat yang berasal dari klan atau kesukuan. Meski demikian, identitas kesukuan dan personal masyarakat Arab Saudi esensinya tidak berubah (Ibrahim,1982:76).

Ketika era negara bangsa belum bergulir di Arab Saudi, derajat kesukuan dan klan adalah sama, sepadan, dan tidak memiliki legitimasi khusus dalam kerangka wilayah dan dominasi yang legal, dalam hal ini klan Saud yang menjadi kepala negara (kepala pemerintahan dan kepala keagamaan) dan menguasai wilayah yang disebut sebagai Arab Saudi. Wahhabisme juga tidak memiliki kerangka khusus dalam mendominasi ideologi masyarakat Arab Saudi yang mayoritas dan hampir seluruh masyarakatnya adalah penganut Islam. Klan hanya dapat mendapatkan penghormatan lebih tinggi apabila mengungguli klan lainnya serta menjalani kooperasi dengan klan yang lebih tinggi

seperti dalam hal kerjasama sosial dan pernikahan (Ibrahim,1982:78).

Pada era Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, peralihan tersebut terlihat secara nyata. Secara legitimasi kesukuan, tentu klan Arab Saudi memiliki signifikansi yang komprehensif pada masyarakat Arab Saudi. Hal ini kemudian tumbuh dan mengalami perubahan tidak hanya dalam hal kesukuan namun dalam legitimasi kekuasaan negara. Peristiwa pembentukan negara Arab Saudi pada 1932 menjadi titik peralihan daripada legitimasi lama yang hanya menempatkan variabel identitas kesukuan sebagai pemegang legitimasi umum menjadi bertambah pada variabel identitas kenegaraan yang tetap tidak menurunkan derajat stratifikasi klan Al Saud. Era ini justru memperjelas klan Al Saud sebagai pemegang kekuasaan secara formal dan tertulis dalam konstitusi yang telah ditetapkan. Peran Wahhabisme dalam dinamika sosial dan politik masyarakat juga berdampak pada penegasan legitimasi tersebut (Bill,1972:273).

Pada era Saud bin Abdul Aziz Al Saud, kondisinya tidak terlalu berbeda dengan Abdul Aziz. Raja telah ditempatkan sebagai pemegang keputusan tertinggi dan telah memiliki identitas yang komprehensif dalam konteks legitimasi kekuasaan atas klan-klan dan atas masyarakat Arab Saudi. Era Saud bin Abdul Aziz Al Saud justru

mempertegas dengan tetap dijalankannya nepotisme yang sangat kompleks. Saud mengangkat anggota keluarganya dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan, termasuk dalam penempatan kementerian. Pada era Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, kondisi legitimasi dapat dikatakan semakin menguat di mata masyarakat Arab Saudi. Di sisi lain, pada pihak keluarga kerajaan sendiri terjadi ketidakstabilan yang disebabkan oleh pemotongan keuangan kerajaan oleh Faisal bin Abdul Aziz Al Saud terkait dengan berbagai kebijakan penghematan keuangan negara. Hal ini terus terjadi hingga 1973 dimana keuangan negara menguat dikarenakan pemasukan yang diterima Arab Saudi dari penjualan komoditas minyak yang naik sangat drastis. Pada sisi legitimasi dengan klan, Faisal bin Abdul Aziz Al Saud adalah raja pertama yang menempatkan Ahmad Zaki Yamani yang memiliki akar klan dari Yaman menjadi bagian dari pemegang jabatan di pemerintahan, yaitu menteri perminyakan. Faisal bin Abdul Aziz Al Saud menempatkan profesionalitas dalam kerangka kepengurusan negara di luar konteks “bangsawan” keluarga kerajaan (Zuhur,2011:289).

2. Kaum Kaya

Perkembangan ekonomi Arab Saudi membawa berbagai implikasi bagi struktur sosial, terutama pada lapisan menengah

yang berkembang lebih jauh. Kaum badui sebagai pemilik tempat awal stratifikasi paling rendah di Arab Saudi berkembang menjadi berbagai bentuk perubahan yang disebabkan perkembangan ekonomi baru di Arab Saudi pasca penemuan minyak di Arab Saudi. Kaum badui mengalami detribalisasi dan menunjukkan berbagai perubahan seperti pada aspek ekonomi yang dikembangkan oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud dan menciptakan tatanan sosial-komunal yang baru. Kaum badui yang memiliki ciri khusus mencair dan berubah dalam berbagai bentuk, seperti halnya dengan kaum kaya baru yang menempati stratifikasi sosial di Arab Saudi (Bill,1972:299). Kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh raja turut mengubah tatanan masyarakat. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud berusaha mengubah kaum Badui yang tidak memiliki kepastian posisi geografis menjadi penduduk yang memiliki tempat tinggal dan tatanan kehidupan yang teratur (Bill,1972:245).

Masuknya suasana ekonomi baru melahirkan pelaku-pelaku ekonomi baru yang menciptakan dinamika baru di masyarakat Arab Saudi, yang kemudian membawa mereka menjadi kaum kaya. Pada masa Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, kaum kaya baru berasal dari keluarga kerajaan yang mendapatkan benefit dari penjualan dan ekspor minyak dalam jumlah besar. Sebagai contoh,

keluarga bin Laden adalah pengelola dan perencana awal infrastruktur pada program Aramco di Dhahran pada 1948, namun, pada masa Faisal bin Abdul Aziz Al Saud telah bertransformasi menjadi salah perusahaan kontraktor terbesar di Arab Saudi dan secara materi klan bin Laden mendapatkan berbagai benefit dari keuntungan-keuntungan tersebut (Bill,1972:245).

3. Kelas Menengah Baru

Wujud lain dari adanya interaksi antara orang-orang selain Arab Saudi dengan Arab Saudi adalah kaum menengah di antara orang-orang tersebut. Adanya Kaum Badui yang telah ada di Arab Saudi, lalu kedatangan orang-orang asing yang berasal dari luar Arab Saudi memiliki *point of knowledge* yang berbeda merupakan fenomena sosial yang terjadi saat itu (Roosevelt,1949:158). Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud menjadi penengah antara Nejd dan Hijaz dalam bidang agama, dan menjadi penengah juga dalam bidang modernisasi antara ulama-ulama Wahhabi dengan proses modernisasi itu sendiri. Secara lebih luas, hal ini juga berlaku untuk hal-hal yang asing bagi Arab Saudi. Seperti yang telah dikatakan oleh Roosevelt (1949:155) bahwa elemen paling penting di Arab Saudi saat itu adalah raja, Islam dan ulama Wahhabi, dan orang-orang Amerika. Pada satu waktu, raja dapat menjadi

mediator di antara kedua hal tersebut, Wahhabisme dan orang-orang Amerika.

Jenis menengah baru ini adalah orang-orang biasa yang awalnya tidak terlihat langsung dalam perkembangan kehidupan dan negara Arab Saudi. Mereka adalah ekspatriat asing yang datang ke Arab Saudi dan orang-orang Arab Saudi yang memiliki posisi baru dalam tatanan sosial di Arab Saudi. Ekspatriat asing yang datang ke Arab Saudi kemudian menempati daerah-daerah koloni homogen yang diperuntukkan bagi mereka, para ekspatriat, untuk bekerja dan veraktivitas di Arab Saudi. Otoritas perusahaan biasanya membuat berbagai macam fasilitas sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dari negara asal, seperti misalnya di Amerika Serikat.

Perubahan Sosial-Politik

Masyarakat Arab Saudi secara sosial-politik telah memasuki era dunia baru pada 1932. Sebelumnya, Arab Saudi masih menjadi sebuah wilayah yang tidak teridentifikasi secara khusus sebagai sebuah negara yang dipimpin sebuah bangsa. Namun, pasca 1932, negara yang diberikan nama Arab Saudi atau Arab yang berkaitan langsung dengan Klan Saud memiliki identitas sendiri secara sosial-politik. Kekuasaan digunakan dengan sistem monarki absolut ketika raja dijadikan sebagai pemegang keputusan tertinggi. Pemegang legitimasi kekuasaan tertinggi

saat itu adalah keluarga kerajaan dibantu oleh klan Al Syaikh dan ulama dalam menjalankan tatanan pemerintahan Arab Saudi. Negara ini mentransformasi masyarakatnya secara drastis pada permulaan pemerintahan dengan kegiatannya-kegiatan detribalisasi untuk mereduksi masyarakat yang tidak tersentuh tangan pemerintahan kerajaan. Pemerintah Arab Saudi meminimalisasi resiko penurunan legitimasi dan menaikkan tingkat dukungan masyarakat dengan menaikkan dukungan kepada kaum badui dan nomad di Arab Saudi dengan kesejahteraan dan hidup yang layak. Hal ini dilakukan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud secara konkret dalam kebijakan-kebijakan awalnya mengenai detribalisasi.

1. Transformasi Badui dan Detribalisasi

Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud dalam menyikapi kaum badui menemukan solusi terbaik dan logis dalam melakukan perubahan sosial. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud melihat adanya sesuatu yang dapat menyatukan mereka, yaitu ideologi yang masuk akal dan dapat meyakinkan mereka untuk bersatu. Ideologi tersebut adalah kepatuhan terhadap Wahabisme. Mereka yang disatukan Abdul Aziz menggunakan “Wahhabi” dalam ruang lingkup yang dinamakan *Al Ikhwan*

(persaudaraan) (Howarth,1964:13). Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud adalah penganut Wahhabi asli yang menggunakan peluang untuk mempengaruhi sesama muslim penganut ajaran Wahhabi untuk mendirikan kerajaan, tetapi dia sendiri tidak fanatik dalam menjalankannya. Seperti yang dikatakan oleh Weston (2008:62) bahwa Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud adalah orang yang cukup terbuka dan ramah bagi orang asing. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud juga tidak menolak adanya inovasi yang dilakukan oleh Barat dan menggunakannya. Dia berfikir rasional dan mengetahui batas-batas kekuatannya dan bangsanya.

Al-Ikhwan juga secara legitimasi dijadikan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud sebagai senjata politik. Mereka adalah penduduk dari perkampungan yang dibentuk Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud untuk para kaum badui yang kemudian menjadi tentara yang berjuang membantu Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud dalam perang dan pemberontakan di Arab Saudi, termasuk penyatuan Arab Saudi (*Arabia Unified*). Pergerakan Al-Ikhwan sebenarnya berdasarkan semangat dan ideologi agama yang dimanifestasikan dan dibentuk dalam pergerakan politik atas instruksi dari Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Dalam hal ini, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud juga melibatkan ulama dalam memberikan pengaruh dan

ikut dalam aktivitas pergerakan seperti membuka tanah baru yang akan ditinggali kaum badui tersebut (Howarth,1964:84). Anggota Al Ikhwan ketika pertama kali terbentuk adalah berjumlah 10.000 orang yang berasal dari kaum badui. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud membangun pemukiman di dekat oase (Howarth,1964:13). Pemukiman itu berkembang dan membuat sebuah stratifikasi sosial. Beberapa bagian pemukiman dipimpin oleh seorang pemimpin yang terpilih berdasarkan sistem sosial masyarakat badui yang didampingi dan diawasi oleh *Mutawwa*, perwakilan dari ulama Wahhabi (Howarth,1964:35). Pemukiman ini juga kemudian membentuk sistem ekonomi yang mengacu pada aktifitas pertanian dan perkebunan (Howarth,1964:35).

Pada masa Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, reformasi tanah, reformasi pertanian dan program distribusi lahan dilakukan pada 1930an dan memberikan dampak pada tatanan sosial di Arab Saudi. Pengaruh yang signifikan dalam kebijakan-kebijakan tersebut adalah memperkenalkan perubahan kondisi iklim yang kering kepada masyarakat Arab Saudi dengan menggunakan teknologi modern dalam hal penggunaan air bawah tanah dengan menggunakan pompa modern. Perubahan yang signifikan tersebut mengubah karakteristik masyarakat Saudi.

Reformasi lahan mengubah tatanan fundamental kaum badui dan mengubah tata hubungan antar segmen masyarakat. Masyarakat baru ini disebut sebagai *the villager* dan *the city dweller* oleh Allan M. Findlay (2002:14).

2. Agama, Politik dan Perubahan Legitimasi Klan Al Saud

Masa Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud adalah masa pembentukan identitas kenegaraan bagi Arab Saudi. Identitas masyarakat yang telah ada dibentuk oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan yang strategis yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahan atau bahkan mempertahankan kekuasaan. Identitas kenegaraan yang coba dibangun oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud adalah identitas dominasi Klan Al Saud sebagai sebuah klan yang memiliki otoritas kenegaraan tertinggi di Arab Saudi. Selain itu, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud juga mengubah berbagai sudut pemikiran dasar tentang modernisasi dan pengaruh asing terhadap masyarakat Arab Saudi dengan melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan Inggris dan Amerika (Zuhur,2011:35).

Kedudukan klan Al Saud sebagai klan yang dominan sejatinya telah dibangun pada 3 dinasti Saud sebelumnya yang menguasai beberapa wilayah dimana negara Arab Saudi sekarang berdiri. Sebelumnya,

klan Al Saud atau klan lainnya adalah sama dan memiliki kedudukan mereka setara kecuali beberapa mendominasi karena pengaruh keterkaitan dengan klan terhormat dan memiliki pengaruh. Kemudian, pada masa sebelum deklarasi pendirian negara secara independen, klan Saud berhasil menyatukan suku-suku Arab melalui berbagai propaganda untuk menyelesaikan Revolusi Arab pada 1921 (Zuhur,2011:37). Penyatuan suku-suku Arab oleh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud bukan saja membuat posisi klan Saud menjadi lebih terhormat dan disegani oleh klan yang lain. Namun, posisi persona Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud yang terlihat sebagai pemimpin klan Al Saud juga ikut naik. Hal ini membuat Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud memiliki kuasa tidak tertulis dalam melakukan pengelolaan kesukuan di Arab Saudi dan terus melanggengkan berbagai strategi dalam menyatukan berbagai klan, seperti dengan metode perkawinan dan peperangan antar klan. Hingga masa pendirian negara tiba, Al Saud terlihat sebagai klan yang memiliki dominasi yang tinggi (Zuhur,2011:28).

Posisi dominasi klan Al Saud yang tinggi tersebut dapat dilihat dari pembentukan negara yang sangat diidentikkan dengan klan Al Saud, yaitu nama negara yang terdiri dari kata Saudi. Pembentukan negara atas nama Al Saud menaikkan klan Al Saud dalam posisi

pemilik kekuasaan tertinggi dan berpeluang membawa keluarga dengan klan saud menjadi pemilik stratifikasi utama dalam struktur sosial Arab Saudi dan diikuti dengan klan-klan yang memiliki keterkaitan dengan Saud. Hal ini terlihat dengan adanya hak istimewa dalam bidang politik dan pemerintahan yang didapatkan oleh Klan Saud dan klan yang dekat dengan klan Al Saud. Di masa Saud bin Abdul Aziz Al Saud, legitimasi kerajaan yang sudah menjadi *trademark* terus dikembangkan. Di masa Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, dia merasionalisasikan status klan yang dalam perbedaan “bangsawan” dengan organisasi kenegaraan secara umum. Menurut Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, siapa saja berhak menjadi pembantu dan pelayan masyarakat Arab Saudi walaupun bukan berasal dari klan Al Saud atau klan yang dekat dengan klan Al Saud. Faisal bin Abdul Aziz Al Saud tidak mengistimewakan secara khusus klan Saud dalam institusi pemerintahan. Sebagai contoh, hadirnya Abdullah Al Tariki dan Ahmaz Zaki Yamani sebagai menteri perminyakan pada era Faisal bin Abdul Aziz Al Saud memperlihatkan inklusifitas pemerintahan dan tidak diperuntukkan hanya untuk klan Al Saud saja. Hal tersebut terjadi walaupun Faisal bin Abdul Aziz Al Saud dapat menggunakan sistem monarki sebagai pelindung legitimasi klan Saud (Zuhur,2011:56-58).

Sistem monarki Arab Saudi menerapkan pemimpin spiritual dan pemimpin tertinggi dunia secara bersamaan. Raja sebagai *sheikh al masyayikh*, Imam dan raja dari sebuah negara. Hal ini memperlihatkan adanya tradisi kesukuan, keagamaan, dan pengaturan politik mereka saling berkaitan satu sama lain. Hal ini juga merefleksikan kehidupan kedekatan sosial dalam kesukuan dan agama mereka yang bersatu dan terintegrasi dalam entitas yang satu. Hal tersebut membentuk fondasi kehidupan sosial politik dan integritas agama sebagai *output*. Keterkaitan antara pemimpin dan objek yang dipimpin terkait sangat dekat dan terkesan informal. Adanya fungsi majlis kerajaan terlihat kemiripan dengan sistem majlis dalam masyarakat kesukuan yang menerapkan musyawarah (Zuhur,2011:55-57).

Faktor perubahan dalam struktur politik dan ideologi Klan Al Saud adalah ketika klan Saud melakukan koalisi dengan Syikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang biasa disebut dengan Al Syaikh, yang melakukan pergerakan di tahun 1744 mengenai pemurnian agama. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud yang dekat dengan klan Al Syaikh dan memiliki hubungan darah, juga melakukan propaganda kembali kepada prinsip dasar Islam dan berbuat berdasarkan kitab suci Al-Qur'an. Islam dijadikan oleh Abdul Aziz

bin Abdurrahman Al Saud sebagai dasar dalam kepercayaan, budaya, politik dan kemasyarakatan. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud melakukan sosialisasi ideologi Wahhabisme dan membangun fondasi sosial-politik dan tatanan budaya yang baru. Islam menjadi ideologi dasar dan tujuan dasar bagi negara Arab Saudi. Klan Al Saud berubah posisi yang sebelumnya menjadi klan yang dominan dan memimpin, menjadi ditambah dalam status legitimasi Islam. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud menjadi imam dan Syeikhnya para Syekh. Secara bersamaan, transformasi klan dari pemimpin klan-klan tradisional menjadi pemimpin dalam bidang agama. Perubahan sosial-politik ini menjadi penanda bagi klan Al Saud terhadap klan lainnya berdasarkan kekuasaan dan kepemimpinan politiknya agar tercapai legitimasi yang utuh untuk klan Al Saud (Rasheed,2002:84).

Terminologi imam dalam perspektif Saudi-Wahhabi yaitu dua tanggung jawab besar yang dibawa oleh seseorang, yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin klan. Basis agama, yang disematkan dalam imam, adalah refleksi dari simbolisasi imam dalam diri pemimpin klan. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud kemudian mendirikan pemerintahannya secara sistematis pada 1932an dan menerapkan banyak hal. Misalnya sistem zakat, *baitul mal* (badan pengelola harta publik) yang

dapat memberikan kesejahteraan bagi warga lain. Ketentuan syariah diperkenalkan dan diterapkan secara komprehensif serta diimplementasikan dalam dunia kriminal, misalnya atas kasus pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, pencurian, pernikahan, hukum warism, perceraian dan lainnya. Kepemimpinan Imam dalam terminologi kedaulatan negara yang diselenggarakan oleh klan Saud memberikan alternatif kepada kepemimpinan badui yang sama-sama menggunakan ideologi Islam (Rasheed,2002:88).

Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud menyatakan pada deklarasi penyatuan kerajaan pada 1926 bahwa seluruh peraturan berjalan berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah dan terikat oleh sistem syariah. Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud dalam pidato baiatnya tahun 1964, menyatakan kembali dengan jelas bahwa,

“Konstitusi kita adalah Al-Qur'an dan hukum kita adalah syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sistem pemerintahan kita didasarkan atas kepentingan negara ini, dengan tidak bertentangan dengan prinsip agama kita dan syariah (Saudi Ministry of Information and Broadcasting,1984:41).”

Kerajaan Arab Saudi dan Islam adalah dwitunggal dan melebur satu sama lain. Keduanya saling bersimbiosis dalam kepentingan untuk terus berkesinambungan. Raja memiliki otoritas yang tinggi, tetapi terbatas pada ketentuan Islam. Rezim-rezim klan Al Saud berkomitmen untuk melaksanakan doktrin Wahhabisme dalam menjalankan institusi politik.

Akan tetapi, ada fenomena dimana Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud terlihat berhasil meletakkan agama dalam posisi subordinasi dan menaikkan otoritasnya yang bernilai sekular ke kekuasaan utama, namun seolah otoritas agama masih dipandang nyata. Pada masa Saud bin Abdul Aziz Al Saud, kekuasaan dijalankan secara konvensional dan terdapat dinamika dimana agama masih mengontrol melalui ulama, atas setiap kebijakan-kebijakan negara. Pada masa Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, secara umum, kekuatan politik di luar keluarga kerajaan yang baik ada atau terkait dengan keluarga kerajaan dengan pernikahan silang dengan keluarga atau suku lain, pendapatan minyak, dan pengabdian umum untuk pilar ideologi kembar Kerajaan: monarkisme dan Wahhabisme. Tidak ada partai politik, parlemen, serikat buruh, atau oposisi publik. Hanya sebuah dewan konsultasi yang tidak diselenggarakan dalam beberapa tahun terakhir. Saat itu, pada masa Faisal

bin Abdul Aziz Al Saud membutuhkan tenaga kerja terampil dan profesional untuk mencegah ketidakpuasan ekonomi murni dari masyarakat dan merangsang kesadaran kelas dan tuntutan politik dari “modernisasi” elemen masyarakat (Zuhur,2011:56).

Perubahan Sosial-Budaya terkait dinamika Sosial-Politik

Konsekuensi dan implikasi dari perubahan ekonomi dan perubahan sistem pemerintahan juga berimbas pada perubahan sosial-budaya. Perkembangan ekonomi berpengaruh sangat signifikan dalam dinamika sosial-budaya Arab Saudi. Hal ini dikarenakan komoditas minyak yang memiliki pendapatan langsung dari hasil komersialisasi minyak bumi mulai tahun 1948. Pada masa Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, Saud bin Abdul Aziz Al Saud dan Faisal bin Abdul Aziz Al Saud adalah masa transisi dan perubahan dari sisi tradisional menjadi pandangan modern yang didasarkan pada perkembangan ekonomi (Niblock,2006:26). Pada masa Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, karakteristik masyarakat yang agraris tentu sangat berlawanan pada permulaan perkembangan ekonomi yang terletak pada aspek sumber daya mineral. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud harus melakukan detribalisasi dan menata masyarakat kaum badui untuk dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia. Pada masa Saud bin

Abdul Aziz Al Saud, program konvensional tidak banyak dilakukan. Namun, pada masa Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, pengelolaan sumber daya manusia secara besar-besaran mulai dari aspek pendidikan, aspek komunikasi, aspek administrasi dan aspek pemerintahan menjadi konsentrasi sendiri bagi Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Menurut Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, pendidikan adalah penjaga kedaulatan negara di kemudian hari (Niblock,2006:27).

1. Industrialisasi dan Serapan Tenaga Kerja

Interaksi dapat menyebabkan adanya pembauran dan perpindahan dalam hal wawasan dan pengetahuan, termasuk keterampilan. Hadirnya orang-orang Amerika dalam melaksanakan hak konsesi di Arab Saudi membutuhkan adanya tenaga bantuan dari masyarakat Arab Saudi itu sendiri untuk menekan pengeluaran perusahaan dan menciptakan tenaga terampil di Arab Saudi yang dapat hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi. Ada dua catatan khusus yang terlihat dalam pengembangan masyarakat yang didasarkan atas interaksi antara orang-orang Amerika dan Arab Saudi. Pertama, Abdul Aziz membutuhkan pertahanan yang kuat dan modern yang dapat meningkatkan kualitas militer negara dalam membendung seranagn-serangan eksternal. Amerika dan Inggris hadir sebagai produsen produk-produk persenjataan terbaru dan bersedia

untuk melatih para pasukan militer Arab Saudi (Twitchell,1947:110-111). Kedua, persoalan Aramco itu sendiri yang meluncurkan program-program pelatihan bagi tenaga lokal untuk ditugaskan dalam perusahaan tersebut. Program ini adalah implementasi dari kesepakatan antara pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang dalam hal ini adalah Abdul Aziz sebagai raja dengan Aramco (Roosevelt,1949:164-165). Aramco dipandang sebagai sumber implikasi yang penting untuk dilihat dalam pengembangan masyarakat setelah sosok Abdul Aziz itu sendiri. Ekspansi pengaruh Aramco terlihat dari kegiatan dasar perusahaan, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan untuk berbagai tingkatan jabatan. Hal yang dapat diamati secara seksama adalah porsi tenaga kerja Aramco yang berasal dari kaum badui yang beradaptasi dengan cepat dalam mempelajari sesuatu hingga mampu mengelola teknologi perusahaan, seperti mengontrol mesin dan komputer (Zuhur,2011:78).

Implikasi ekonomi yang besar sejalan dengan adanya konsekuensi sosial. Aramco membuka gerbang pembauran manusia di daerah tandus yang berada di Arab Saudi. Perusahaan tersebut membuka pekerjaan dan mendatangkan manusia yang berasal dari negara yang bervariasi, dengan kebudayaan dan kebiasaan yang beragam. Rata-rata mereka yang bekerja di Aramco pada masa Abdul Aziz berasal dari Somalia,

Sudan, negara-negara Timur Tengah, India, Italia dan tentu Amerika itu sendiri (Roosevelt,1949:165). Untuk itu, Aramco membuat pelayanan sosial dalam aspek-aspek vital seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi dan wilayah pemukiman yang khusus diperuntukkan bagi pegawai-pegawai Aramco yang bukan masyarakat Arab Saudi. Pada saat itu, Arab Saudi dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, namun terdapat pelarangan dari Ulama terhadap masyarakat untuk bergaul dan membaur dengan orang-orang asing. Adanya *semi cultural separation* adalah sebuah kewajaran, namun tingkat penambahan jumlah pegawai-pegawai yang berasal dari Arab Saudi dan mulai mendapatkan posisi yang tinggi di perusahaan membuat pembauran itu terjadi dan pegawai-pegawai Arab Saudi mulai berlaku seperti orang Amerika, seperti misalnya mengenal alkohol (Butler,2008:28).

2. Mobilisasi Sosial

Pada 1935, mobil-mobil telah menggantikan secara penuh fungsi unta sebagai alat transportasi, terutama bagi masyarakat *upper class*. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud dan rombongannya menggunakan mobil dalam menjalankan aktivitasnya. Weston (2008:147) menceritakan bahwa sejak 1920an, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al SAud dan istri-istrinya naik di belakang truk selama 5 hari untuk mencapai kota Mekkah. Hal ini lebih

baik daripada rombongan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud menggunakan unta selama 3 minggu dengan cuaca Arab Saudi yang panas. Pada 1935, istri-istri Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud dan anak perempuan mereka yang telah dewasa, mendapatkan hak perlindungan, yaitu dengan menggunakan sopir sendiri. Ketika Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud menggunakan 250 mobil untuk mengangkut tentara, pengawal pribadi, teknisi, juru tulis, koki, dan pelayan. Teknisinya berasal dari India atau Indonesia, pengawal pribadi berasal dari negara-negara Afrika, yang merupakan anak-anak budak yang dipelihara Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud menggunakan mobil modifikasi yang berbadan panjang. Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud menikmati penggunaan mobil untuk menjalani hobinya dalam berburu antelop (Weston,2008:147).

Pada masa Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, pembangunan transportasi dilakukan sangat masif. Kebijakan awal yang diekluarkan yaitu perbaikan jalan sejauh 659 KM pada 1964 yang mendapat alokasi dana dari negara-negara Teluk (Said,2014:272-273). Pada 1965, Faisal bin Abdul Aziz Al Saud juga mengeluarkan

kebijakan untuk membentuk jalan baru yang menghubungkan antara Thaif dengan Mekkah sejauh 87 KM. Jalan ini melewati pegunungan Al Hada dengan meratakan bagian gunung sebanyak 3 juta meter kubik dan pengaspalan sejauh 650 KM (Said,2014:272). Pada aspek udara, pada masa Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, atau pada 1966 terjadi transaksi pembelian pesawat oleh pemerintahan Arab Saudi kepada Douglas America dengan kesepakatan pembelian pesawat Douglas America ukuran kecil dan menengah. Total dana yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi untuk proyek ini sebanyak SR 65 juta. pesawat diantarkan oleh Douglas America kepada pihak pemerintah Arab Saudi pada kurun waktu Oktober-Desember 1973 (Said,2014:274-275). Pada jalur-jalur laut, Faisal bin Abdul Aziz Al Saud mengandalkan pembukaan pelabuhan-pelabuhan baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan perdagangan dan Industri. Faisal membuka pelabuhan di Dammam, Jeddah, Jizan dan Yanbu pada 1970an.

3. Wanita dan Perkembangan Arab Saudi

Hal yang juga jadi perhatian penulis adalah perkembangan wanita di Arab Saudi dalam berbagai aspek, seperti kebebasan hingga hak pendidikan. Pada masa Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, keterlibatan wanita dalam perkembangan

sosial tidak banyak terlihat karena masih terpaut pada karakteristik sebelum Arab Saudi menjadi negara kerajaan Arab Saudi dimana wanita masih dalam posisi subordinat bagi perkembangan negara. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya sekolah khusus perempuan yang didirikan pada masa Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Pada masa Saud bin Abdul Aziz Al Saud, perkembangan wanita hanya dititikberatkan pada wanita-wanita anggota keluarga kerajaan. Mereka diberikan sekolah di istana-istana keluarga kerajaan dengan khusus guru wanita. Perkembangan yang signifikan justru terlihat pada masa Faisal bin Abdul Aziz Al Saud yang memberikan wanita ruang seluas-luasnya dalam menikmati pendidikan di Arab Saudi (Zuhur,2011:78). Faisal bin Abdul Aziz Al Saud bersama istrinya, Iffat Al Thunayan melakukan modernisasi pendidikan formal dengan memasukkan wanita sebagai peserta yang sama dengan laki-laki. Namun, kebijakan tersebut dilakukan dengan tidak meninggalkan ideologi negara, yaitu Islam untuk tidak mencampur pergaulan antara wanita dengan laki-laki. Pada masa ini, Faisal bin Abdul Aziz Al Saud mendirikan sekolah-sekolah khusus wanita mulai dari sekolah tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Faisal bin Abdul Aziz Al Saud membuat sekolah khusus guru wanita dan bahkan pada 1974, tercatat telah 4 wanita menerima gelar Ph.D dari luar Arab

Saudi karena implikasi proyek pengiriman mahasiswa Arab Saudi ke luar negeri selama 1964-1975 (Said,2014:56).

KESIMPULAN

Masa-masa raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, Saud bin Abdul Aziz Al Saud, dan Faisal bin Abdul Aziz Al Saud adalah waktu transisi Arab Saudi dari negara yang memiliki masyarakat yang berkarakteristik kesukuan menjadi negara yang menjalani proses kenegaraan dengan lebih mengedepankan metode *nation state* sebagai model utama negara. Ada tiga hal menarik yang peneliti uraikan sebagai bentuk perubahan sosial pada masa-masa tersebut, antara lain adalah struktur sosial Arab Saudi, sosial-politik Arab Saudi, dan sosial-budaya Arab Saudi. Pada aspek struktur sosial, Arab Saudi mengalami perkembangan dan keragaman komposisi struktur sosial dengan munculnya kaum kerajaan yang menempati stratifikasi tertinggi pada struktur sosial yang melakukan dominasi masyarakat dan menjalani kepemimpinan negara, sekaligus mengatur negara. Kemudian, pada perkembangannya muncul juga kaum kaya serta kaum menengah baru yang berasal dari masyarakat Arab Saudi yang bertransformasi serta kaum ekspatriat yang mengalami persinggungan budaya dengan masyarakat Arab Saudi. Pada aspek sosial-politik, penulis menyoroti perubahan

identitas legitimasi kesukuan menjadi legitimasi kenegaraan yang dialami klan Al Saud. Klan Al Saud yang awalnya memiliki kekuasaan dengan identitas dasar sebagai klan dominan di Arab Saudi berubah bukan hanya sebagai klan yang dominan, tetapi memiliki kekuatan legal dalam menjalani dan memimpin dalam ruang lingkup negara. Pada aspek perubahan sosial-budaya terkait dinamika sosial-politik, peneliti menyoroti perubahan pada perubahan sosial yang mengarah pada modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abraham, M. Francis. (1991). *Modernisasi di dunia ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Al-Rasheed, Madawi. (2002). *A History of Saudi Arabia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Barakat, Halim. (2012) *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Butler, Grant C. (2008). *Kings and Camels: An American in Saudi Arabia*. Reading: Garnet Publishing.
- Denzin, N. K. dan Y. S. Lincoln. (1994). *Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE Publication.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Findlay, Allan M. (2002). *The Arab World*. London: Routledge.
- Harper, Robert Alexander. (2007). *Saudi Arabia*. New York : Infobase Publishing.
- Howarth, David Armine. (1964). *The Desert King: Ibn Saud and His Arabia*. US: MacGraw-Hill.
- Ibrahim, Saad E. (1982). *The New Arab Social Order*. Beirut: Centre for Arab Unity Studies.
- _____. (1982). *Arab Society: Social Science Perspective*. Cairo: Ammer University.

- Khaldun, Ibnu (2011). *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Martono, Nanang. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nata, Abuddin (2011). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Niblock, Tim (2006). *Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival*. London: Routledge.
- Niblock, Tim dan Monica Malik (2007). *The Political Economy of Saudi Arabia*. New York : Routledge.
- Nuseibeh, Hazem Zaki. (1956). *The Ideas of Arab Nationalism*. New York: Cornell University Press.
- Philby, H. St. John. (1955). *Saudi Arabia*. London: Ernest Benn Limited.
- Rapar, Jan Hendrik (1996). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Roosevelt, Kermit. (1949). *Arab Oil and History*. New York: Harper and Brothers.
- Paul Suparno. (2008). *Action Research: Riset Tindakan Untuk Pendidik*. Jakarta: Grasindo.
- Sztompka, Piötr. (2011). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Twitchell, Karl S. (1947). *Saudi Arabia: With an Account of the Development of Its Natural Source*. New Jersey: Princeton University Press.
- Weston, Mark. (2008). *Prophets and Princes: Saudi Arabia from Muhammad to the Present*. New Jersey: John Wiley and Sons.
- Wynbrandt, James. (2004). *A Brief History of Saudi Arabia*. New York: Facts on File.
- Zuhur. Sherifa. (2011). *Saudi Arabia*. New York: ABC Clio.

Artikel Jurnal

- Bill, J. (1972). Class Analysis and the Dialectics of Modernization of Middle East. *International Journal of the Middle East Studies*, 3(4), 417-434. Retrieved from <http://remote-lib.ui.ac.id:2059/stable/162490>.
- Freeman, Richard. (2014). King Faisal and the Forging of The Anglo-Saudi Terror Alliance. *Executive Intelligence Review*, 41(26), 30-33.